

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama pemasukan negara, pajak di Indonesia dalam pengurusannya diberikan wewenang kepada Ditejen Pajak untuk melakukan penarikan dan pengawasan, akan tetapi banyak sekali terjadi penyelewengan yang dapat merugikan negara. Ditjen pajak Memiliki PPNS dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana perpajakan

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia kewenangaannya mengalami Overlapping dengan PPNS karena dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur Polisi berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana perpajakan, dunia hukum mengenal asas *lex specialis lex generalis* yang khusus mengalahkan yang umum, yang berhak melakukan penyidikan Tindak perpajakan hanya PPNS perpajakan.

Kata kunci: pajak, overlapping, penyidikan

abstrac

Taxes are the main source of state revenue, tax in Indonesia in the submission are given authority to the Director General of Taxation to make withdrawals and supervision, but a lot of instances of abuse that can harm the state. Tax Directorate has investigators in conducting examination tax crime Indonesian

Police Authority power that experience Overlapping with investigators Because in Article 14 paragraph (1) of the Act No 2002 about Indonesian National Police set police the right to conduct investigations and inquiries of all criminal offenses, no exception tax crime, the legal world recognize the principle of "lex specialis lex generalis" defeat a common, the right to conduct an investigation follow taxation only tax investigators

Keyword: tax, overlapping, investigators

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Ketentuan Umum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)

Peraturan menteri keuangan Nomor 18 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Surat Edaran 49 Tahun 2013 tentang Tata Cara Bukti Permulaan

Surat Edaran 06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
Dibidang Perpajakan

